

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahuluheluw, S. S. 2013. Pentingnya Transparansi Pemerintah dalam Pelaksanaan Pembangunan di Distrik Sorong Timur Kota Sorong. *Jurnal Governance* 5(1): 90-97.
- Astuti, D. 2014. Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada Pengelolaan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Makassar.
- Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). 2017. Pengelolaan Pajak yang Profesional, Transparan dan Akuntabel. <https://bpkpd.surabaya.go.id/>. 01 November 2022 (15:23).
- Fatansyah. 2015. *Basis Data*. Bandung: Informatika Bandung.
- Hardiyanti, V. 2017. Analisis Pemungutan Pajak Hiburan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. <https://ejournal.unesa.ac.id>. 11 Oktober 2022 (00:03).
- Kautsar, M., M. Andirfa, dan B. Rahman. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Peningkatan Kinerja Pengelolaan Pajak Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan* 3(2): 69-81.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004. *Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Tanggal 24 Februari 2004.
- Krina, L. P. L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Maani, K. Dt. 2009. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi* 8(1): 47-60.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mudiarti, H., A. Lestari, dan B. Setiawan. 2020. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kewajiban Moral dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi* 1(2): 17-20.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 *Pajak Daerah*. 27 April 2011. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2021 *Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya*. 17 November 2021. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 121 Tahun 2021 *Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya*. 30 Desember 2021. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021. Surabaya.
- Putri, F. M. W. I. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Publik (Studi tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan pada Izin Usaha di Dinas Perdagangan Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik* 2(1): 49-54.
- Rondonuwu, B. C., M. T. Lopian, dan J. Kairupan. 2017. Akuntabilitas Kinerja Aparat dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan. *Jurnal Eksekutif* 1(1): 1-11.
- Rosdiana, H., R. Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sangki, A. A., R. Gosal, dan J. Kairupan. 2017. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). <https://ejournal.unsrat.ac.id>. 19 Oktober 2022 (20:02).

- Sri, V. dan A. Suryo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: PT Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sukmadewi, F. 2019. Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran. *Jurnal Moderat* 5 (3): 344-354.
- Sutedjo. 2019. Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Tahwin, M. 2013. Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 18(2): 136-143.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 *Keterbukaan Informasi Publik*. 30 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta
- Zahra, I. A., S. Gemilang. 2021. Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada UKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1(2): 1-12.